

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 adalah 280.725.428 orang, dengan 141.671.644 orang laki-laki dan 139.053.784 orang perempuan. Proporsi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 hampir sama, dengan hanya 0,94% lebih banyak laki-laki. Jika dilihat berdasarkan provinsi, Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ketiga, hanya di belakang Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. (Profil Kemenkes., 2023).

Menurut proyeksi, total penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 37.540.962 orang, terdiri dari 18.866.523 pria dan 18.674.539 wanita. Penduduk Jawa Tengah telah meningkat sebesar 1,00 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk di Jawa Tengah adalah 1.093 jiwa/km². Kabupaten Semarang, dengan 1.080.648 jiwa, berada di urutan ke-15 dari 35 kabupaten/kota. (Profil Kesehatan Jawa Tengah.,2023).

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan penduduk adalah dengan menyebarkan program keluarga berencana kepada masyarakat. Keluarga berencana membantu mengurangi angka kematian ibu dengan mengatur waktu, jarak, dan jumlah kehamilan, mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan, dan nifas, dan mencegah kematian ibu yang mengalami komplikasi tersebut. (Profil Kemenkes., 2023).

Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat kontrasepsi tertentu tanpa mengharapkan kehamilan di kemudian hari adalah peserta program KB. Peserta KB terdiri dari peserta kontrasepsi modern yang menggunakan metode kontrasepsi berupa kontrasepsi steril wanita (MOW), kontrasepsi steril pria (MOP), IUD/AKDR, implan/susuk, suntik, pil, kondom, dan metode amenore laktasi (MAL), dan peserta kontrasepsi tradisional yang menggunakan metode kontrasepsi seperti pantang berkala, senggama terputus,

dan metode lain. PUS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah 5.993.886 pasang. Dari PUS yang ada saat ini, 76,3% adalah peserta KB aktif metode modern. Pola pemilihan metode kontrasepsi modern yang digunakan oleh peserta KB aktif pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta KB menggunakan suntik sebesar 56,28%. Pola ini berulang setiap tahun dan menunjukkan bahwa peserta KB lebih suka metode kontrasepsi jangka pendek, meskipun penggunaan metode jangka panjang mulai meningkat (Implan 13,93%). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih efektif untuk menghentikan kehamilan lebih lama dari pada metode KB suntik atau pil. (Profil Kesehatan Jawa Tengah.,2023).

Berdasarkan data dari (BPS Kabupaten Semarang.,2023), Jumlah PUS Kabupaten Semarang tahun 2022 sebanyak 189.113 pasang, dari jumlah tersebut terdiri dari kotrasepsi MKJP sebanyak 45.999 yang terbagi dari kontrasepsi IUD 12.308, MOP 6.038, MOW 544, Implan 27.109 dan Non MKJP yang terbagi dari kontrasepsi Suntik 68.929, Pil 7.911, Kondom 2.791. Berdasarkan data dari Puskesmas Tuntang tahun 2023, Jumlah PUS di wilayah Puskesmas Tuntang sejumlah 1.383 pasang, yang terdiri menggunakan MKJP sebesar 28,26% dan yang menggunakan non MKJP sebesar 54,22%. Data tersebut menunjukkan bahwa akseptor KB di Puskesmas Tuntang masih banyak menggunakan kontrasepsi non MKJP. Permasalahan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal yakni semakin meningkatnya jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, struktur penduduk yang masih muda dan kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan. (BKKBN, 2021)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang efektif yang digunakan untuk menunda kehamilan, mengontrol jarak kehamilan, dan menghentikan kesuburan untuk jangka waktu yang lama. Selain memiliki efektivitas tinggi, MKJP juga dianggap aman karena tidak memiliki efek samping yang signifikan (BKKBN, 2017). Namun, masih rendahnya penggunaan MKJP dikarenakan faktor pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang kelebihan MKJP. Pengetahuan sendiri sangat berperan penting dalam proses menentukan keputusan bagi akseptor terhadap

keikutsertaan pada MKJP. Pengetahuan akan menimbulkan suatu keyakinan pada seseorang, sehingga akan berperilaku sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. (BkkbN & Kemenkes, 2018).

Ini sesuai dengan temuan penelitian (Puspitasari dkk., 2023), yang menunjukkan bahwa dari 30 responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang pemilihan MKJP sebanyak 21 responden (70%) dan sebagian besar berpendidikan perguruan tinggi, sehingga informasi yang diperoleh sudah cukup banyak tentang MKJP, tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan sekaligus bisa menerima informasi atau hal-hal yang baru. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari dkk., 2022) diperoleh hasil tingkat pengetahuan baik dalam memilih kontrasepsi sebanyak 252 responden (72%) dan tingkat pengetahuan baik dalam menggunakan kontrasepsi sebanyak 233 responden (67%), pengetahuan dalam pemilihan dan penggunaan kontrasepsi di kecamatan Tikke Raya didominasi dengan kategori baik karena berdasarkan informasi dari petugas kesehatan poli KB, bahwa masyarakat setempat cukup antusias dalam konseling kontrasepsi dan telah mencapai target pengguna kontrasepsi. Selain itu juga, berdasarkan data karakteristik responden didapatkan pendidikan yang cukup tinggi (SMA) dimana pada tingkat ini seseorang telah dibekali pengetahuan yang cukup. Namun, pengetahuan yang baik bisa saja berubah karena adanya perubahan perilaku yang tidak didasari pengetahuan dan kesadaran.

Dari hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Puskesmas Tuntang, diperoleh bahwa sudah berjalannya penyuluhan dan KIE tentang metode kontrasepsi jangka panjang, namun masih banyak PUS hanya mengetahui beberapa jenis dan efek samping dari MKJP. Dari masalah pada latar belakang yang telah didapatkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Tentang Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Akseptor KB Non-MKJP di Wilayah Puskesmas Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran pengetahuan tentang penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB non-MKJP di wilayah Puskesmas Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengetahuan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB Non-MKJP di wilayah Puskesmas Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB Non-MKJP di wilayah Puskesmas Tuntang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui dan mendapatkan pengalaman yang nyata dalam melakukan penelitian tentang gambaran pengetahuan tentang penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB Non-MKJP di wilayah Puskesmas Tuntang, Kec. Tuntang, Kab. Semarang.

2. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam pengambilan kebijakan ataupun perbaikan program terkait strategi sebagai dasar pentingnya program perencanaan keluarga.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan Fakultas Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo Ungaran tentang gambaran pengetahuan tentang penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB Non-MKJP di wilayah Puskesmas Tuntang.

4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi akseptor KB tentang penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang.